BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan secara yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat pembagian sanksi terhadap anak sebagai pelaku yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana, adanya rentang usia pengenaan sanksi terhadap anak yaitu anak berusia 12 hingga sebelum 14 tahun dikenakan sanksi tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 14 hingga sebelum 18 tahun dikenakan sanksi pidana. Pengaturan sanksi baik sanksi tindakan maupun sanksi pidana yang diberikan hanya disesuaikan dengan batas usia tanpa melihat berat ringan tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 69 yang menyebutkan bahwa anak yang berusia 12 hingga sebelum 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sementara perbuatan yang dilakukannya termasuk dalam kualifikasi tindak pidana berat yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Begitu pula terhadap pengenaan sanksi terhadap anak yang berusia 14 hingga sebelum 18 tahun dikenakan sanksi pidana dengan ketentuan bahwa anak hanya dikenakan 1/2 pidana dari ancaman orang dewasa. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak tidak mengatur klasifikasi tindak pidana berat maupun ringan terhadap perbuatan yang dilakukan anak sebagai pelaku, dan pengenaan sanksi terhadap anak sebagai pelaku baik itu sanksi tindakan ataupun sanksi pidana hanya ditentukan berdasarkan usia.

2. Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang yaitu perlu adanya evaluasi mengenai penerapan sanksi yang lebih tegas dan jelas terhadap anak sebagai pelaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan sanksi tidak hanya didasarkan pada batasan usia anak sebagai pelaku namun seharusnya juga diperjelas mengenai berat ringannya perbuatan yang telah dilakukan. Sanksi tindakan dapat dikenakan pada anak yang berusia 12 hingga sebelum 14 tahun tetapi hanya pada perbuatan tindak pidana ringan, jika perbuatan yang dilakukannya termasuk pada kategori tindak pidana berat seperti yang mengakibatkan kematian maka seharusnya ancaman pengenaan sanksi berupa sanksi pidana. Begitu pula untuk aturan sanksi pidana yang dikenakan pada anak usia 14 hingga sebelum 18 tahun bahwa perlu adanya evaluasi kembali dan penambahan syarat bagi anak yang dikenakan sanksi pidana yaitu berupa sanksi 1/2 dari maksimum ancaman orang dewasa tidak berlaku jika perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku termasuk perbuatan tindak pidana berat dan keji yang mengakibatkan kematian maka ancaman pidananya sama seperti orang dewasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat diberikan saran yaitu:

1. Perlu adanya ketegasan pembenahan terkait kebijakan hukum pidana terhadap sanksi tindakan dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah dapat mengevaluasi dan meregulasi kembali pada Pasal 69 terutama dalam ayat (2) dapat dikembangkan dengan penambahan ayat berikutnya berupa kejelasan mengenai apabila kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku termasuk kejahatan tindak pidana berat yaitu menghilangkan nyawa seseorang maka ancaman yang dikenakan adalah sanksi pidana yang sama seperti orang dewasa. Jadi pengenaan sanksi tindakan tidak hanya didasarkan pada batas usia anak sebagai pelaku, namun juga didasarkan pada berat ringannya perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Perlu untuk diperhatikan kembali oleh para penegak hukum dalam mengevaluasi ketentuan-ketentuan mengenai sanksi bagi anak sebagai pelaku yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berkaitkan dengan negara China yang merevisi kembali batas usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana yaitu dari 14 tahun ke 12 tahun yang seharusnya dapat menjadi suatu perbandingan bagi pemerintah Indonesia terutama penegak hukum untuk hukum pidana di masa yang akan datang dengan memberikan

sanksi yang setegas-tegasnya tanpa memandang usia serta dikaji dari berat atau ringannya perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi dengan tetap mengarah pada prinsip pemulihan dan rehabilitasi yang efektif, karena dengan adanya kepastian dan ketegasan serta sejalan dengan pemulihan yang bermutu maka secara tidak langsung menjalankan pencegahan perbuatan serupa di masa yang akan datang.